



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN NEGERI SIBOLGA KELAS I B TAHUN 2024



PENGADILAN NEGERI SIBOLGA KELAS IB

Jln. Padangsidempuan Nomor 6 Kota Sibolga, Telp/Fax. 0631-21572
Website: www.pn-sibolga.go.id Email: pnsibolgakota@gmail.com

PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga Pengadilan Negeri Sibolga Kelas IB dapat menyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahunan 2024. Laporan tahunan ini merupakan hasil akhir dari perencanaan dan aktualisasi program kerja Pengadilan Negeri Sibolga pada Tahun 2024.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024 ini, meliputi di bidang - bidang Teknis Yustisial, Pengawasan Internal, Pembinaan SDM, Pengelolaan Sarana Dan Prasarana, Keuangan serta Pengelolaan Administrasi.

Selain memberikan informasi sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan tugas, juga diharapkan menjadi bahan evaluasi dan perencanaan di masa mendatang agar kinerja Pengadilan Negeri Sibolga menjadi lebih baik dalam upaya mewujudkan Visi Dan Misi Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu Terwujudnya Badan Peradilan Yang Agung.

Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini, telah dilakukan secara optimal dan seobyektif mungkin, namun disadari masih terdapat kekurangan dan kelemahan oleh karena itu diharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari semua pihak, untuk kesempurnaan dan peningkatan kinerja Pengadilan Negeri Sibolga di masa mendatang. Ucapan terimakasih yang tak terhingga disampaikan kepada Tim Penyusun dan Semua Warga Pengadilan Negeri Sibolga yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan laporan ini, serta apresiasi yang setinggi tingginya atas kinerja dan dedikasi dalam pelaksanaan tugas demi terwujudnya Peradilan Yang Agung.

Demikian Laporan Tahunan Kegiatan Pengadilan Negeri Sibolga tahun 2024, kami sampaikan

semoga dengan adanya laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua agar lebih terpacu dan menjadi lebih optimal dalam melaksanakan kinerja dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat di bidang hukum, sehingga dapat terwujud supremasi hukum dan keadilan khususnya di Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah

Sibolga, 10 Januari 2025
Ketua Pengadilan Negeri Sibolga



HENDRA UTAMA SOTARDODO

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	4
BAB I PENDAHULUAN	5
1.1. Kebijakan Umum Peradilan	4
1.2. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Sibolga	6
1.3. Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sibolga	6
1.4. Struktur Organisasi dan Tupoksi	11
BAB II KEADAAN PENGADILAN	
2.1. Keadaan Perkara	13
2.2. Penyelesaian Perkara	26
2.3. Akreditasi Penjaminan Mutu (sertikat ISO Pengadilan)	28
2.4. Posbakum	29
2.5. Sidang Keliling	30
2.6. Perkara Prodeo	30
BAB III SUMBER DAYA MANUSIA	
3.1. Mutasi	34
3.2. Promosi	36
3.3. Pensiun	36
3.4. Diklat	36
BAB IV PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA/PRASARANA & TEKNOLOGI INFORMASI	
4.1. Pengelolaan Keuangan	37
4.2. Pengelolaan Sarana & Prasarana Gedung Kantor	38
4.3. Pengelolaan Teknologi Informasi	41
BAB V PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK	
5.1. Akreditasi Penjaminan Mutu	45
5.2. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	46
5.3. Inovasi Pelayanan Publik	47
5.4. Internal	47
5.5. Evaluasi	49
BAB VII PENUTUP	
6.1. Kesimpulan	50
6.2. Saran Saran/Rekomendasi	50

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. KEBIJAKAN UMUM PERADILAN

Pengadilan Negeri Sibolga sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman di daerah dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh Pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya, sehingga cita-cita Negara hukum yang menjamin penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan dapat terwujud.

Tugas pokok Pengadilan menerima, memeriksa dan menyelesaikan perkara yang diajukan sesuai dengan kompetensinya masing-masing yang berpedoman kepada hukum dan keadilan. Dalam rangka mengemban tugas pokok tersebut, tidak terlepas adanya sorotan dari para pencari keadilan, sehingga Mahkamah Agung dan jajarannya dibawahnya dari tahun ke tahun terns berbenah diri guna memenuhi standar pelayanan publik yang telah ditetapkan di bidang peradilan.

Berhasil tidaknya peradilan dalam menjalankan tugas pokok tersebut tidak hanya ditentukan oleh faktor internal saja, akan

tetapi juga dipengaruhi faktor eksternal khususnya badan penegak hukum lainnya, seperti Kepolisian, Kejaksaan, Penasihat Hukum, Lembaga Pemasyarakatan dan pihak/instansi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu perlu dibangun suatu hubungan dan kerja sama yang baik agar tugas pokok Pengadilan tersebut dapat tercapai dengan maksimal.

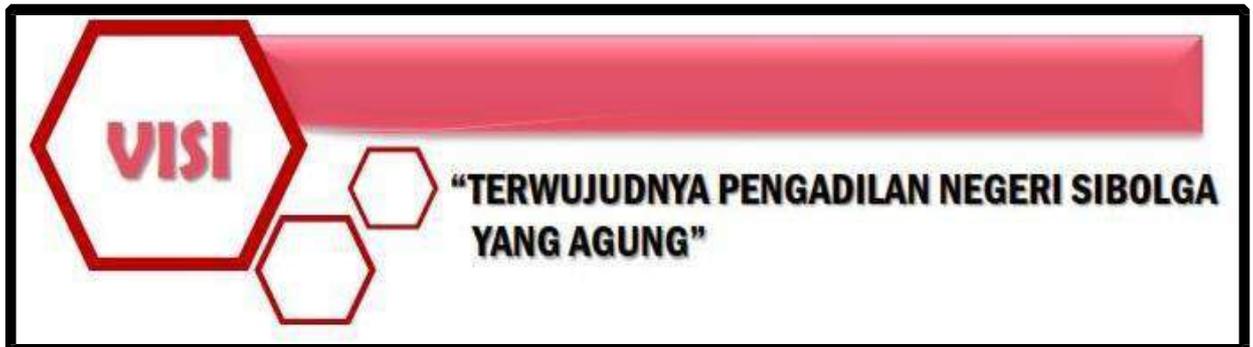


Gambar Gedung Pengadilan Negeri Sibolga

Dalam menyikapi posisi dan tugas pokok tersebut, peradilan telah bertekad untuk menjalankan fungsinya secara maksimal, memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada para pencari keadilan dengan tetap berpedoman kepada 2"Mengadili menurut hukum dan keadilan". Untuk mencapai hal tersebut tidak terlepas dari dukungan semua pihak serta tersedianya sarana dan prasarana maupun kesejahteraan yang memadai sesuai dengan standar kebutuhan hidup para aparatur pengadilan.

➤ VISI DAN MISI PENGADILAN NEGERI SIBOLGA

Pengadilan Negeri Sibolga dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut dilandasi dengan Visi dan Misi yaitu :



Untuk mewujudkan visi tersebut, Pengadilan Negeri Sibolga menetapkan Misi, yaitu sesuatu yang harus dilaksanakan untuk mencapai Visi. Misi Pengadilan Negeri Sibolga adalah :



- **MENJAGA KEMANDIRIAN PENGADILAN NEGERI SIBOLGA.**
- **MEMBERIKAN PELAYANAN HUKUM YANG BERKEADILAN KEPADA PENCARI KEADILAN.**
- **MENINGKATKAN KUALITAS KEPEMIMPINAN DI PENGADILAN NEGERI SIBOLGA.**
- **MENINGKATKAN KREDIBILITAS & TRANSPARANSI DI PENGADILAN NEGERI SIBOLGA.**

1.3. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PENGADILAN NEGERI SIBOLGA

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategi adalah langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi yang bersangkutan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan baik lokal, nasional maupun global. Dengan adanya perencanaan strategi yang baik, maka instansi pemerintah yang bersangkutan lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kerjanya.

Pada dasarnya setiap satuan kerja seharusnya mempunyai ukuran/ barometer untuk menilai sejauh mana roda organisasi dapat berjalan dengan baik atau tidak, apa hambatan dan tantangan serta tujuan yang belum tercapai. Seluruh staf/pegawai mempunyai peranan yang sama dalam memajukan dan menjalankan roda organisasi.



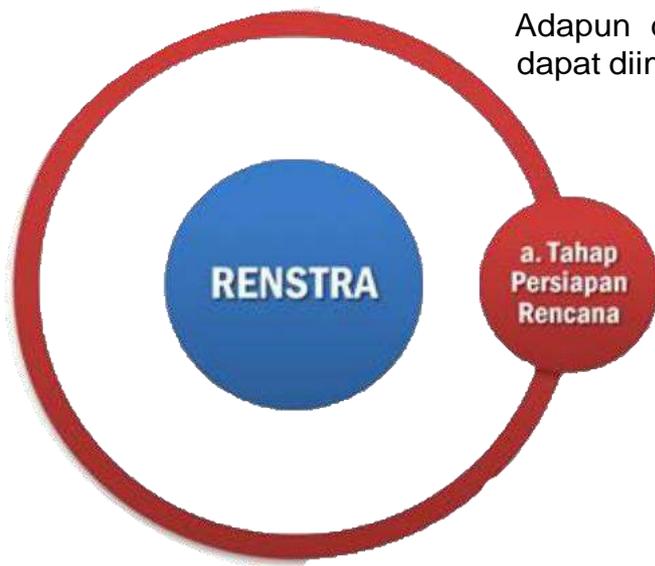
Dengan perencanaan strategi yang baik diharapkan akan dapat meningkatkan kinerja sekaligus dapat meningkatkan pelayanan yang prima kepada masyarakat pencari keadilan. salah satu unsur pokok untuk terwujudnya sistem akuntabilitas pada pelaksanaan tugas pokok Pengadilan Negeri Sibolga adalah pada dasarnya setiap satuan kerja seharusnya mempunyai ukuran / barometer untuk menilai sejauh mana roda organisasi dapat berjalan dengan baik atau tidak, apa hambatan dan

tantangan serta tujuan yang belum tercapai. Seluruh staf / pegawai mempunyai peranan yang sama dalam memajukan dan menjalankan roda organisasi. Terus tersusun dan terprogram setiap rencana kerja dalam suatu bentuk Rencana Strategi (Renstra) dengan berbasis kinerja yang merupakan pedoman pelaksanaan Tupoksi, sehingga segala bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan dapat diatur secara terencana dan terukur.

Penyusunan rencana dan program pada hakekatnya adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran/tujuan tertentu. Adapun sasaran/tujuan mengandung pengertian bahwa perencanaan berkaitan erat dengan perumusan kebijaksanaan. Sehubungan dengan itu perencanaan pada garis besarnya terdiri atas beberapa tahapan yang harus dilalui dan dilaksanakan oleh setiap lembaga/unit organisasi/instansi hingga di daerah sebagai berikut:

A. Tahapan Persiapan Rencana

1. Tahap persiapan rencana yaitu mengidentifikasi, menganalisa dan merumuskan masalah, merumuskan alternatif kebijaksanaan dan menetapkan kebijaksanaan.
2. Tahap penjabaran kebijaksanaan ke dalam sasaran dan anggaran yaitu mengkoordinasikan penjabaran kebijaksanaan ke dalam sasaran dan anggaran, memantapkan penjabaran sasaran dan anggaran, menetapkan sasaran dan anggaran, menjabarkan satuan ke dalam rancangan satuan, menetapkan rancangan kegiatan, sasaran dan anggaran.



Adapun dasar penyusunan strategi tersebut dapat diimplementasikan melalui 4 strategi yaitu:

1. Mewujudkan Pengadilan yang mandiri dan indenpenden, bebas dari campur tangan pihak lain dan transparan.
2. Mewujudkan peradilan yang efektif, efesien, bermartabat, berwibawa dan dihormati
3. Mewujudkan kualitas pelayanan hukum secara prima kepada masyarakat pencari keadilan.
4. Mewujudkan Profesional kinerja aparat Pengadilan Negeri Sibolga.

Rencana strategis ini dengan program yang terkait, memberi inisiatif awal dengan berbagai tantangan dan masalah yang akan diatasi. Tantangan utama meliputi :

1.1 Memelihara kepercayaan masyarakat Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah terhadap sistem peradilan khususnya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Peradilan.

- a. Kepercayaan dan keyakinan dalam sistem peradilan di Indonesia pada umumnya telah terkikis disebabkan kelambanan dalam penyelesaian perkara, persepsi tentang korupsi, kolusi dan nepotisme, dan akses terbatasnya pada pelayanan peradilan, solusi efektif untuk masalah tersebut adalah membuat pola dasar dimana kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan bisa kembali pulih.
 - b. Rencana strategis akan memberi prioritas pada sistem dan prosedur peradilan, perbaikan institusi serta sumber daya manusia atau operasional manajemen yang langsung mempengaruhi efisiensi pemberian pelayanan informasi publik pada peradilan, pada kejujuran dan ketidakberpihakan dari putusan pengadilan. Transparan dan integritas dari proses peradilan dan perlindungan kerahasiaan jika diperlukan.
 - c. Lebih jauh program ini akan menyatukan dan mengkoordinasikan berbagai unsur program melalui pendekatan holistik sehingga perwujudan dari visi dan misi dapat dicapai dengan target secara maksimal.
2. Rencana strategis akan memerlukan sumber daya tetapi dapat dicapai dalam konteks keterbatasan kemampuan sumber daya yang tersedia.

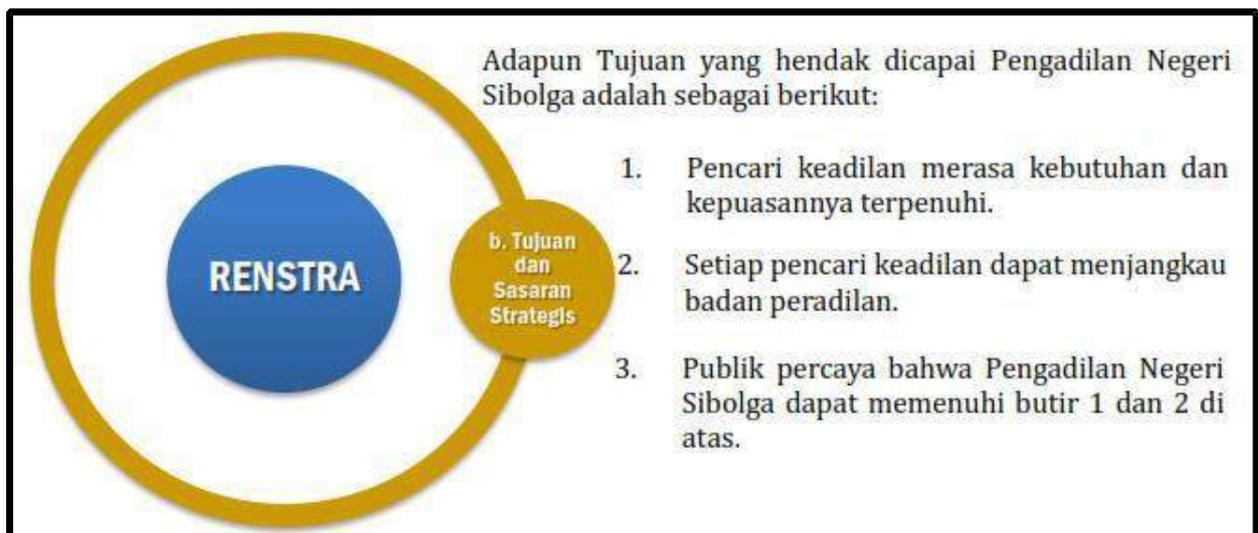
Pengadilan Negeri Sibolga berusaha untuk memprioritaskan pembangunan sistem peradilan dalam anggaran yang tersedia, di samping itu Pengadilan Negeri Sibolga akan memobilisasi dan menggunakan secara efisien semua sumber daya internal dan eksternal dalam operasional rutin guna mencapai misi, tujuan dan target yang telah ditetapkan.

Dari rencana strategi di atas, kunci keberhasilan pembangunan yang dirumuskan melalui rencana strategi Pengadilan Negeri Sibolga ke depan dapat dirumuskan dalam 4 aspek yaitu:

1. Ketenagaan mencakup:
 - a. Penambahan jumlah tenaga teknis dan tenaga administrasi.
 - b. Peningkatan kualitas melalui pendidikan dan pelatihan.
 - c. Penataan kembali sistem pembinaan karir pegawai menurut alur karir yang ada.
 - d. Penggunaan teknologi informasi dalam sistem pelaporan dan administrasi.
2. Sarana mencakup:
 - a. Pengadaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan yang nyata.
 - b. Pengembangan perpustakaan melalui koleksi buku, sarana dan prasarana, berikut sistempelayanannya melalui sistem aplikasi.
 - c. Peningkatan jumlah anggaran melalui DIPA sesuai dengan rencana kebutuhan fisik Pengadilan Negeri Sibolga.
3. Ketatalaksanaan mencakup:
 - a. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara optimal.
 - b. Melaksanakan program Pengadilan Negeri Sibolga yang telah disusun dengan tetap berdasarkan kepada ketentuan undang-undang, peraturan pemerintah, SEMA, juklak dan juknis yang ada.
4. Hukum Materil mencakup:
 - a. Penelaahan dan inventarisasi materi hukum
 - b. Memasyarakatkan hukum yang berlaku melalui sosialisasi dan dialog terhadap masyarakat umum khususnya para pencari keadilan.

B. Tujuan Dan Sasaran Strategis

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Negeri Sibolga.



Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkandalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2025, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Sibolga adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Pengadilan Negeri Sibolga memiliki kebijakan program yaitu :



1. Mengusulkan penambahan pegawai dan meningkatkan kemampuan serta mutu para pejabat/staf.
2. Mengikutkan para pelaksana/operator dan pejabat struktural serta fungsional untuk mengikuti pelatihan dan penjenjangan.
3. Melakukan koordinasi dengan Pengadilan Tinggi Medan dan Mahkamah Agung RI serta masyarakat agar kinerja pimpinan dan staf peradilan berkualitas dan profesional.
4. Menciptakan sistem administrasi dan informasi terpadu serta transparansi.
5. Meningkatkan sarana dan prasarana yang ada.
6. Peningkatan kualitas dan mutu pelayanan (*client service*) terhadap pencari keadilan.
Menetapkan standarisasi biaya perkara.
7. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang akurat dan berkesinambungan untuk para pencari keadilan melalui media informasi elektronik yang dapat diakses melalui website Pengadilan Negeri Sibolga, SIPP versi 5.6.4 dan direktori putusan MARI.

1.4. STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI)

Setiap kantor Pengadilan dipimpin oleh Ketua dan dibantu oleh seorang Wakil Ketua dimana kedua-duanya adalah sebagai Pimpinan Pengadilan yang bertugas dan bertanggungjawab atas terselenggaranya citra dan wibawa Pengadilan. Ketua Pengadilan dalam melaksanakan tugasnya selalu berkoordinasi dengan Pimpinan Unit Struktural dalam mewujudkan keserasian kerja diantara para pejabat, menegakkan disiplin kerja dan juga selalu mendorong serta memberi kesempatan bagi semua warga Pengadilan untuk selalu meningkatkan pengetahuan.

Disamping itu, para Pimpinan Pengadilan mengelola (managerial skill) yang meliputi rencana kerja (programming), pelaksanaan (actuating), aturan pelaksanaan (organizing) dan mengawasi pelaksanaannya (controlling). Badan Peradilan merupakan pelaksana Kekuasaan Kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan tugas pokok menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan kewenangannya serta tugas-tugas lain yang diberikan berdasarkan peraturan Perundang-Undangan.

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga dipimpin oleh seorang Panitera yang membawahi:

- ✓ Panitera Muda Perdata.
- ✓ Panitera Muda Pidana.
- ✓ Panitera Muda Hukum.
- ✓ Panitera Pengganti
- ✓ Jurusita/Jurusita Pengganti.

Sedangkan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Sibolga dipimpin oleh Sekretaris yang membawahi:

- ✓ Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan.
- ✓ Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana.
- ✓ Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan.

Adapun Struktur Organisasi pada Pengadilan Negeri Sibolga sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:



BAB II

KEADAAN PERKARA DI PERADILAN UMUM

2.1 KEADAAN PERKARA DI PERADILAN UMUM

Keadaan perkara Pada Tahun 2024 pada Pengadilan Negeri Sibolga keseluruhan perkara masuk dan berhasil diselesaikan tepat waktu pada tahun 2024, berikut disajikan rinciannya:

1.1 Keadaan Perkara Tingkat Pertama

Keadaan perkara Pada Tahun 2024 pada Pengadilan Negeri Sibolga keseluruhan perkara masuk dan berhasil diselesaikan tepat waktu pada tahun 2024, berikut disajikan rinciannya :

No	BULAN	PIDANA BIASA			
		Sisa	Masuk	Putus	Sisa Akhir
1.	JANUARI	48	33	29	52
2.	FEBRUARI	52	20	23	49
3.	MARET	49	17	28	38
4.	APRIL	38	3	22	19
5.	MEI	19	27	14	32
6.	JUNI	32	15	10	37
7.	JULI	37	24	26	35
8.	AGUSTUS	35	37	19	53
9.	SEPTEMBER	53	23	23	53
10.	OKTOBER	53	23	36	40
11.	NOVEMBER	40	40	22	58
12.	DESEMBER	58	34	49	43
TOTAL			296	301	509

Tabel Perkara Pidana Biasa Tahun 2024

No	BULAN	PIDANA CEPAT			
		Sisa	Masuk	Putus	Sisa Akhir
1.	JANUARI	0	0	0	0
2.	FEBRUARI	0	0	0	0
3.	MARET	0	0	0	0
4.	APRIL	0	0	0	0
5.	MEI	0	0	0	0
6.	JUNI	0	0	0	0
7.	JULI	0	1	1	0
8.	AGUSTUS	0	1	1	0
9.	SEPTEMBER	0	1	1	0
10.	OKTOBER	0	0	0	0
11.	NOVEMBER	0	2	2	0
12.	DESEMBER	0	1	1	0
TOTAL			6	6	

Tabel Perkara Pidana Cepat Tahun 2024

No	BULAN	PIDANA PRAPERADILAN			
		Sisa	Masuk	Putus	Sisa Akhir
1.	JANUARI	2	0	2	0
2.	FEBRUARI	0	1	0	1
3.	MARET	1	7	1	7

4.	APRIL	7	1	7	1
5.	MEI	1	0	1	0
6.	JUNI	0	0	0	0
7.	JULI	0	0	0	0
8.	AGUSTUS	0	0	0	0
9.	SEPTEMBER	0	0	0	0
10.	OKTOBER	0	0	0	0
11.	NOVEMBER	0	1	0	1
12.	DESEMBER	1	0	1	0
TOTAL			10	12	10

Tabel Perkara Pidana Praperadilan Tahun 2024

No	BULAN	PIDANA ANAK			
		Sisa	Masuk	Putus	Sisa Akhir
1.	JANUARI	0	1	0	0
2.	FEBRUARI	1	0	2	0
3.	MARET	0	1	0	1
4.	APRIL	1	0	1	0
5.	MEI	0	0	0	0
6.	JUNI	0	0	0	0
7.	JULI	0	2	0	2
8.	AGUSTUS	2	1	3	0
9.	SEPTEMBER	0	1	0	1
10.	OKTOBER	1	2	1	2

11.	NOVEMBER	2	2	4	0
12.	DESEMBER	0	1	1	0
TOTAL			11	12	6

Tabel Perkara Anak Tahun 2024

No	BULAN	PIDANA LALU LINTAS			
		Sisa	Masuk	Putus	Sisa Akhir
1	JANUARI	0	174	110	64
2	FEBRUARI	64	85	149	0
3	MARET	0	20	20	0
4	APRIL	0	210	201	9
5	MEI	9	150	159	0
6	JUNI	0	210	210	0
7	JULI	0	999	606	393
8	AGUSTUS	393	144	537	0
9	SEPTEMBER	0	272	272	0
10	OKTOBER	0	229	221	8
11	NOVEMBER	8	357	365	0
12	DESEMBER	0	98	98	0
TOTAL			2948	2948	474

Tabel Perkara Lalu Lintas Tahun 2024

No	BULAN	PERDATA GUGATAN			
		Sisa	Masuk	Putus	Sisa Akhir
1	JANUARI	38	14	8	44
2	FEBRUARI	44	11	10	45
3	MARET	45	16	11	50
4	APRIL	50	13	18	45
5	MEI	45	18	20	43
6	JUNI	43	8	10	41
7	JULI	41	14	10	45
8	AGUSTUS	45	13	14	44
9	SEPTEMBER	44	20	12	52
10	OKTOBER	52	13	17	48
11	NOVEMBER	48	6	14	40
12	DESEMBER	40	10	17	33
TOTAL			156	161	530

Tabel Perkara Perdata Gugatan Tahun 2024

No	BULAN	PERDATA PERMOHONAN			
		Sisa	Masuk	Putus	Sisa Akhir
1	JANUARI	3	32	19	16
2	FEBRUARI	16	30	34	12
3	MARET	12	17	21	8
4	APRIL	8	14	12	10
5	MEI	10	21	16	15
6	JUNI	15	22	22	15

7	JULI	15	32	33	14
8	AGUSTUS	14	42	40	16
9	SEPTEMBER	44	23	31	36
10	OKTOBER	52	13	17	48
11	NOVEMBER	9	14	17	6
12	DESEMBER	6	13	15	4
TOTAL			273	277	200

Tabel Perkara Permohonan Tahun 2024

No	BULAN	PERDATA GUGATAN SEDERHANA			
		Sisa	Masuk	Putus	Sisa Akhir
1	JANUARI	2	2	2	2
2	FEBRUARI	2	4	3	3
3	MARET	3	0	3	0
4	APRIL	0	0	0	0
5	MEI	0	1	1	0
6	JUNI	1	4	1	4
7	JULI	4	1	1	4
8	AGUSTUS	1	0	1	0
9	SEPTEMBER	0	0	0	0
10	OKTOBER	0	0	0	0
11	NOVEMBER	0	1	0	1
12	DESEMBER	1	0	1	0
TOTAL			13	13	14

Tabel Perkara Gugatan Sederhana Tahun 2024

1.2 Keadaan Perkara Tingkat Banding

No	PIDANA UMUM					
	Bulan	Sisa	Masuk	Kirim	Cabut	Sisa Akhir
1	Januari	4	4	8	0	0
2	Februari	1	4	5	0	0
3	Maret	0	5	4	0	1
4	April	1	5	5	0	1
5	Mei	0	0	0	0	0
6	Juni	0	0	0	0	0
7	Juli	0	6	2	0	4
8	Agustus	0	4	2	0	2
9	September	2	3	5	0	0
10	Oktober	0	8	5	0	3
11	November	2	7	9	0	0
12	Desember	0	8	8	0	0

No	PIDANA ANAK					
	Bulan	Sisa	Masuk	Kirim	Cabut	Sisa Akhir
1	Januari	0	0	0	0	0
2	Februari	0	0	0	0	0
3	Maret	0	0	0	0	0
4	April	0	0	0	0	0
5	Mei	0	0	0	0	0
6	Juni	0	0	0	0	0
7	Juli	0	0	0	0	0

8	Agustus	0	0	0	0	0
9	September	0	0	0	0	0
10	Oktober	0	0	0	0	0
11	November	0	0	0	0	0
12	Desember	0	1	1	0	0

Tabel Perkara Banding Pidana Tahun 2024

No	PERDATA					
	Bulan	Sisa	Masuk	Kirim	Cabut	Sisa Akhir
1	Januari	6	4	6	1	3
2	Februari	4	1	3	0	2
3	Maret	1	4	0	2	3
4	April	4	0	4	0	0
5	Mei	0	3	0	0	3
6	Juni	3	1	4	0	0
7	Juli	0	1	0	0	1
8	Agustus	1	2	1	1	1
9	September	1	2	1	1	1
10	Oktober	1	6	3	0	4
11	November	4	2	6	0	0
12	Desember	3	2	3	0	2

Tabel Perkara Banding Perdata Tahun 2024

1.3 Keadaan Perkara Tingkat Kasasi

No	PIDANA UMUM					
	Bulan	Sisa	Masuk	Kirim	Cabut	Sisa Akhir
1	Januari	2	1	2	0	1
2	Februari	1	4	5	0	0
3	Maret	3	7	4	0	6
4	April	6	3	7	2	0
5	Mei	0	0	0	0	0
6	Juni	0	0	0	0	0
7	Juli	0	4	4	0	0
8	Agustus	0	3	0	0	3
9	September	3	2	4	0	1
10	Oktober	0	0	0	0	0
11	November	1	2	1	0	2
12	Desember	2	2	2	0	2

No	PIDANA ANAK					
	Bulan	Sisa	Masuk	Kirim	Cabut	Sisa Akhir
1	Januari	0	0	0	0	0
2	Februari	0	0	0	0	0
3	Maret	0	0	0	0	0
4	April	0	0	0	0	0
5	Mei	0	0	0	0	0

6	Juni	0	0	0	0	0
7	Juli	0	0	0	0	0
8	Agustus	0	0	0	0	0
9	September	0	0	0	0	0
10	Oktober	0	0	0	0	0
11	November	0	0	0	0	0
12	Desember	0	0	0	0	0

Tabel Perkara Kasasi Pidana Tahun 2024

No	PERDATA					
	Bulan	Sisa	Masuk	Kirim	Cabut	Sisa Akhir
1	Januari	0	2	0	0	2
2	Februari	2	0	1	0	1
3	Maret	0	4	0	0	4
4	April	3	1	1	1	2
5	Mei	0	1	1	0	0
6	Juni	1	3	1	0	3
7	Juli	1	1	2	0	0
8	Agustus	1	1	2	0	0
9	September	2	2	1	1	2
10	Oktober	2	0	2	0	0
11	November	0	1	0	0	1
12	Desember	1	1	1	0	1

Tabel Perkara Kasasi Perdata Tahun 2024

1.4 Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali

No	PIDANA UMUM					
	Bulan	Sisa	Masuk	Kirim	Cabut	Sisa Akhir
1	Januari	0	1	0	0	1
2	Februari	1	0	0	0	1
3	Maret	1	0	0	0	1
4	April	0	0	0	0	0
5	Mei	0	0	0	0	
6	Juni	0	0	0	0	0
7	Juli	0	0	0	0	0
8	Agustus	0	0	0	0	0
9	September	0	0	0	0	0
10	Oktober	0	0	0	0	0
11	November	0	0	0	0	0
12	Desember	0	0	0	0	0

No	PIDANA ANAK					
	Bulan	Sisa	Masuk	Kirim	Cabut	Sisa Akhir
1	Januari	0	0	0	0	0
2	Februari	0	0	0	0	0
3	Maret	0	0	0	0	0
4	April	0	0	0	0	0
5	Mei	0	0	0	0	0
6	Juni	0	0	0	0	0
7	Juli	0	0	0	0	0
8	Agustus	0	0	0	0	0
9	September	0	0	0	0	0
10	Oktober	0	0	0	0	0
11	November	0	0	0	0	0
12	Desember	0	0	0	0	0

Perkara Peninjauan Kembali Pidana Tahun 2024

No	PERDATA					
	Bulan	Sisa	Masuk	Kirim	Cabut	Sisa Akhir
1	Januari	0	0	0	0	0
2	Februari	0	0	0	0	0
3	Maret	0	0	0	0	0
4	April	0	0	0	0	0
5	Mei	0	0	0	0	0

6	Juni	0	0	0	0	0
7	Juli	0	1	0	0	1
8	Agustus	1	0	0	0	1
9	September	1	0	0	0	1
10	Oktober	0	0	0	0	1
11	November	1	1	0	0	2
12	Desember	2	0	2	0	0

Tabel Perkara Peninjauan Kembali Perdata Tahun 2024

2.2 PENYELESAIAN PERKARA

Perkara yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Sibolga terdiri dari Perkara Perdata dan Perkara Pidana. Adapun penyelesaian perkara baik perdata maupun pidana pada Pengadilan Negeri Sibolga Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Jumlah Sisa Perkara yang di Putus

No	Jenis Perkara	Sisa Tahun 2023	Sisa Perkara yang diputus	Sisa Perkara
1	Pidana Biasa	43	43	0
2	Pidana Cepat	0	0	0
3	Pidana Praperadilan	2	2	0
4	Pidana Khusus Anak	0	0	0
5	Lalu Lintas	0	0	0
6	Perdata Gugatan	33	161	35
7	Perdata Permohonan	4	280	5
8	Gugatan Sederhana	-	13	-

2. Jumlah Perkara Yang di Putus Tepat Waktu

No	Jenis Perkara	Sisa Awal	Perkara Masuk 2024	Perkara yang diputus 2024	Sisa Perkara
1	Pidana Biasa	48	296	301	43
2	Pidana Cepat	0	0	0	0
3	Pidana Praperadilan	2	10	12	0
4	Pidana Khusus Anak	0	0	0	0
5	Pidana Lalu Lintas	0	0	0	0
6	Perdata Gugatan	38	160	161	37
7	Perdata Permohonan	3	281	280	4
8	Gugatan Sederhana	0	13	13	0

3. Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi, PK

No	Jenis Perkara	Perkara Masuk	Upaya Hukum	Perkara yang Tidak Upaya Hukum
1	Pidana Biasa	296	95	201
2	Pidana Cepat	6	1	5
3	Pidana Praperadilan	0	0	0
4	Pidana Khusus Anak	11	1	10
5	Pidana Lalu Lintas	0	0	0
6	Perdata Gugatan	160	27	133
7	Perdata Permohonan	281	0	0
8	Gugatan Sederhana	13	1	12

➤ JUMLAH PERKARA PERDATA YANG BERHASIL DI MEDIASI :

No	JUMLAH PERKARA MEDIASI	STATUS KEBERHASILAN MEDIASI			DALAM PROSES
		BERHASIL SEBAHAGIAN	TIDAK BERHASIL	TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN	
1	2	-	-	-	0

➤ JUMLAH PERKARA YANG BERHASIL DIVERSI :

No	JUMLAH PERKARA ANAK	JUMLAH PERKARA DIVERSI	STATUS KEBERHASILAN DIVERSI		
			BERHASIL	TIDAK BERHASIL	TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN / PROSES
1	11	2	2	-	-

2.3 AKREDITASI PENJAMINAN MUTU (Sertifikasi ISO Pengadilan)

Perubahan kebutuhan, tuntutan dan harapan masyarakat bergerak sangat cepat tidak lagi dalam hitungan tahun, bulan atau hari tetapi perubahan terjadi setiap detik. Oleh karenanya organisasi harus bergerak cepat merespon setiap perubahan tersebut melalui pengelolaan manajemen yang digerakkan oleh kepemimpinan berkualitas tinggi yang memiliki kemampuan menggerakkan seluruh komponen dalam organisasi (memotivasi) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung R.I mengeluarkan Program Akreditasi Penjaminan Mutu sebagai jawaban atas perubahan dan merupakan bentuk pembinaan yang inovatif, terstruktur, sistemik dan berkelanjutan.

Perubahan kebutuhan, tuntutan dan harapan masyarakat bergerak sangat cepat tidak lagi dalam hitungan tahun, bulan atau hari tetapi perubahan terjadi setiap detik. Oleh karenanya organisasi harus bergerak cepat merespon setiap perubahan tersebut melalui pengelolaan manajemen yang digerakkan oleh kepemimpinan berkualitas tinggi yang memiliki kemampuan menggerakkan seluruh komponen dalam organisasi (memotivasi) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung R.I mengeluarkan Program Akreditasi Penjaminan Mutu sebagai jawaban atas perubahan dan merupakan bentuk pembinaan yang inovatif, terstruktur, sistemik dan berkelanjutan.

Telah ditetapkan. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI mengeluarkan Program Akreditasi Penjaminan Mutu sebagai jawaban atas perubahan dan merupakan bentuk pembinaan yang inovatif, terstruktur, sistemik dan berkelanjutan. Tujuan dari Akreditasi Penjaminan Mutu ini adalah untuk mewujudkan performa badan peradilan indonesia yang unggul/prima (Indonesian Court Performance-Excellent/ICP-E) melalui penilaian terhadap 7 Kriteria :

1. Kepemimpinan (*Leadership*);
2. Perencanaan Strategis (*Strategic Planning*);
3. Fokus Pelanggan (*Customer Focus*);

4. Manajemen Sumberdaya (*Resources Management*);
5. Proses Manajemen (*Management Process*);
6. Sistem Dokumen (*Document Sistem*);
7. Hasil Kinerja (*Performance Result*);

Pengadilan Negeri Sibolga telah dinyatakan berhasil dalam menyediakan standar pelayanan peradilan sebagaimana yang dimaksud dalam program Akreditasi Penjaminan Mutu tersebut dengan diterimanya Sertifikat Akreditasi Badan Peradilan Umum dengan nilai "A" (Excellent).

Prestasi tersebut tentunya merupakan usaha berkelanjutan untuk terus memperbaiki diri dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat atau pencari keadilan yang merupakan salah satu elemen dalam standar sertifikasi penjaminan mutu. Program ini harus dikelola agar proses dan dampaknya dapat diarahkan pada hasil yang positif terutama dalam perbaikan sistem, kinerja, pelayanan publik, kerjasama dan kepemimpinan. Sinergitas internal dan eksternal harus dibangun agar perubahan dapat dirasakan manfaatnya bagi kita semua yakni mendorong terwujudnya Badan Peradilan yang Agung.

2.4 POSBAKUM

Pelaksanaan Pos Layanan Bantuan Hukum disediakan untuk membantu masyarakat miskin dan tidak ada kemampuan membayar advokat dalam hal membuat surat gugat, advis dan pendampingan hak hak pencari keadilan diluar persidangan (non litigasi). Pos Bantuan Hukum yang dilaksanakan pada Pengadilan Negeri Sibolga adalah berupa jasa Advokat/Pengacara Piket untuk memberikan pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat terutama untuk masyarakat tidak mampu.

Pengadilan Negeri Sibolga merupakan satker yang mendapat alokasi anggaran posbakum. Pengadilan Negeri Sibolga memiliki program-program prioritas dalam peningkatan Manajemen Peradilan yang akan dicapai di antaranya penyelesaian Peradilan Negeri yaitu pos bantuan hukum yaitu penyediaan anggaran untuk pembayaran honorarium jasa konsultan hukum pada pos bantuan hukum dan pemenuhan kebutuhan alat tulis kantor pada pos pelayanan hukum. Anggaran untuk pelaksanaan pos pelayanan hukum

belanja jasa konsultan honor advokat / pengacara piket adalah sejumlah Rp. 36.000.000.00 (tiga puluh enam juta rupiah) yang sudah terealisasi adalah sebesar Rp. 36.000.000.00, (tiga puluh enam juta rupiah), dan persentase capaiannya adalah 100%.

ANGGARAN	REALISASI	SISA	KET
Rp. 36.000.000	Rp. 36.000.000	0	Terealisasi Sepenuhnya (100%)

2.5 SIDANG KELILING / PELAYANAN TERPADU

Dasar hukum pelaksanaan sidang keliling/pelayanan terpadu diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling. Sidang keliling/Pelayanan terpadu merupakan salah satu bagian dari Pelayanan Publik yang Prima dengan maksud untuk mendekatkan akses terhadap pengguna layanan di Pengadilan Negeri Sibolga. Akan tetapi pada tahun 2024 Pengadilan Negeri Sibolga belum dalam melaksanakan sidang keliling. Selain tidak tersedianya dana dalam DIPA Tahun 2024, hal tersebut juga dikarenakan tidak adanya permintaan dan sulitnya koordinasi kepada pihak yang terkait. Selain itu, kondisi dari gedung zitting plaats Pengadilan Negeri Sibolga yang tidak dapat dipergunakan dikarenakan rusak berat akibat kondisi alam (banjir) dan kurangnya anggaran perawatan.

2.6 PERKARA PRODEO (PEMBEBASAN BIAYA PERKARA)

Perkara Prodeo (Pembebasan biaya perkara) diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan dan Surat Keputusan Dirjen Badilum Nomor 52/DJU/SK/HK.006/5/Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

Dalam DIPA tahun 2024 Pengadilan Negeri Sibolga memiliki anggaran sejumlah Rp.2.010.000 (dua juta sepuluh ribu rupiah) untuk perkara Prodeo.

BAB III

SUMBER DAYA MANUSIA

Pengadilan Negeri Sibolga per 31 Desember 2024 memiliki sumber daya manusia (SDM) sebanyak 29 (dua puluh sembilan) orang Pegawai Negeri Sipil serta 10 (sepuluh) orang PPNPN. Jumlah sumber daya manusia pada Pengadilan Negeri Sibolga mengalami mutasi diantaranya, 1 (satu) orang Hakim (Ketua) yang mutasi ke Pengadilan Negeri Ungaran, 1 (satu) orang Hakim (Wakil Ketua) yang mutasi ke Pengadilan Negeri Kisaran, 1 (satu) Hakim dimutasikan ke Pengadilan Negeri Sei Rampah, Kepala Sub Bagian Kepegawaian dimutasikan ke Pengadilan Negeri Stabat, Panitera Pengganti dimutasikan ke Pengadilan Negeri Sibubuhan dan 1 Orang analis perencanaan dan evaluasi pelaporan ke Pengadilan Negeri Balige , dan 1 (satu) orang PNS yang menduduki jabatan panitera muda hukum yang dimutasikan dari Pengadilan Gunung Sitoli dan 1 (satu) orang PNS yang menduduki Kepala Sub Bagian Kepegawaian dari Pengadilan Negeri Sidempuan , Selain itu juga terdapat mutasi yaitu Terlepas dari adanya mutasi masuk dan mutasi keluar pada Pengadilan Negeri Sibolga masih terdapat kekosongan jabatan yaitu tidak adanya Jusurita definitif sehingga dilakukan penunjukkan pelaksana tugas jurusita pengganti lokal yang ditetapkan berdasarkan keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga. Selain jabatan tersebut juga terdapat kekurangan staf pelaksana baik di Kesekretariatan dan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga.

Berikut Rincian kondisi Sumber Daya Manusia (SDM) meliputi Hakim dan Pegawai pada Pengadilan Negeri Sibolga. Rincian sumber daya manusia dapat dilihat pada tabel dibawah ini;

NO	Nama	Jabatan
1	HENDRA UTAMA SOTARDODO, S.H., M.H.	Ketua Pengadilan
2	ANDREAS IRIANDO NAPITUPULU, S.H., M.H.	Hakim
3	FITRAH AKBAR CITRAWAN, S.H., M.H.	
4	YURA PRATAMA YUDHISTIRA, S.H.	
5	EDWIN YONATAN SUNARJO, S.H.	
6	DANANDOYO DARMAKUSUMA, S.H.	

7	FRANS MARTIN SIHOTANG, S.H.	
8	GRACE MARTHA SITUMORANG, S.H.	
9	TEMAZIDUHU HAREFA, S.H.	Panitera
10	ESRON GINTING, S.H.	Sekretaris
11	ARIFMEN KRISTIAN LASE, S.H.	Panitera Muda Hukum
12	ANDRIAN HALOMOAN TUMANGGOR, S.H.	Panitera Muda Perdata
13	CHRISTY TOMY PASARIBU, S.H.,M.H.	Panitera Muda Pidana
14	RONAL SAUT AGUSTIN SIMORANGKIR, S.E.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
15	SEPRI JUNIALSON SITIO, S.T.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan
16	ENDY PANGIHUTAN, S.H.	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
17	PEBRIDO NOVIANTO SIMBOLON, S.H.	Panitera Pengganti
18	ANDREAS WILIE M NAPITUPULU, S.H.;	Panitera Pengganti
19	VIVI MELATI SIBAGARIANG, S.H.	Klerek/ Analis Perkara Peradilan
20	DHONA WAHYUNI	Operator Penata Layanan Operasional
21	MIKA SURYA SITOANG, A.Md	Klerek/ Pengolah Data dan Informasi
22	LUCIANA HALOHO, A.Md	Fungsional Arsiparis Terampil
23	SAHAT PANDAPOTAN PURBA, A.Md	Klerek - Pengolah Data dan Informasi
24	ERWIN HAMONANGAN SIHOMBING	Klerek/ Pengadministrasi Perkantoran
25	RESTIANA, S.H.	CPNS / Klerek Perkara Perkara Peradilan
26	FERDINAN PARASIDO LUMBANTOBING S.H.	CPNS / Klerek Perkara Perkara Peradilan
27	IMMANUEL SAHAT PARLINDUNGAN BANJARNAHOR, S.H.	CPNS / Klerek Perkara Perkara Peradilan
28	RONDANG ROTUA PURBA, A.Md	Klerek/ Pengelola Perkara
29	RENADLY SITUMORANG, A.Md.	Klerek/ Pengelola Perkara
30	SANDRI DEVINA SIAHAAN	PPNPN
31	IVAN NOFRIDAR MENDROFA	
32	SUKMA DHARMA SYAHPUTRA MANALU	
33	MHD.IKBAL HASANAH SIMANULLANG	
34	KIKI ANDRIANI SINAGA	
35	MERRY NATALIA HUTAPEA	
36	NATALIA ZEBUA	
37	ANUGERAH HARAHAHAP	
38	FERRY HONEY FAMILY SIHITE	

39	SWENDI	
----	--------	--

No	Jabatan	Jenis Kelamin		Pendidikan Terakhir						
		L	P	S3	S2	S1	DIV	DIII	DII	SMA
1	Ketua	1			1					
2	Wakil	-			-					
3	Panitera	1				1				
4	Sekretaris	1				1				
5	Hakim	6	1		2	6				
6	Panitera Muda	3	-		1	2				
7	Kepala Sub Bagian	3				3				
8	Panitera Pengganti	2			1	1				
9	Pelaksana	4	4			4		4		
10	CPNS	2	1			1				
11	PPNPN	5	5							
	Total	28	11	-	5	19		4		

No	Jabatan	Golongan Ruang												
		Golongan II				Golongan III				Golongan IV				
		a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	e
1	Ketua										1			
2	Wakil Ketua													
3	Panitera									1				
4	Sekretaris									1				
5	Hakim									8				
6	Panitera Muda						2	1						
7	Kepala Sub Bagian						3							
8	Panitera Pengganti					1		1						
9	Staff / Pelaksana			3		6	1							
10	CPNS					3								
	Jumlah			3		9	2	5	2	10	1			

3.1 MUTASI MASUK

Mutasi masuk pada Pengadilan Negeri Sibolga Tahun 2024 sebanyak dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama	Satuan Kerja Lama	Jabatan Baru
1.	Ronal Saut Agustin Simorangkir,S.E	Pengadilan Negeri Padangsidempuan	Kasub Bag Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana
2.	Arifmen Kristian Lase, S.H.	Pengadilan Negeri Gunung Sitoli	Panitera Muda Hukum
3.	-	-	-

3.1 MUTASI KELUAR

Mutasi keluar pada Pengadilan Negeri Sibolga pada tahun 2024 sebanyak orang, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan Lama	Jabatan Baru
1.	Golom Silitonga,S.H.,M.H.	Ketua	Ketua
2.	Yanti Suryani, S.H.,M.H	Wakil Ketua	Ketua
3.	Firda H.R.S. Ayu Sitorus. S.H	Hakim	Hakim
4.	Chaidir Rudiansyah,S.Kom	Kasub Bag Kepegawaian, Oraganisasi dan Tatalaksana	Kasub Bag, Umum dan Keuangan
5.	Roberto situmeang,S.H	Panitera Pengganti	Panityera Muda Hukum
6.	Masrain Tarihoran,S.Kom	Analisis Perencanaan dan Pelaporan	Kasub Bag Kepegawaian, Oraganisasi dan Tatalaksana

3.2 PROMOSI

Promosi pada jabatan tahun 2024 di Pengadilan Negeri Sibolga orang dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan Lama	Jabatan Baru
1.	-	-	-

Promosi pada kenaikan pangkat tahun 2024 di Pengadilan Negeri Sibolga sebanyak 3 (Tiga orang) orang dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Pangkat Lama	Pangkat Baru	Jenis Promosi
1	Arifmen Kristian Lase, S.H.	Panitera Muda Hukum	III/c	III/d	Reguler
2	Sahat Pandapotan Purba, A.Md	Klerek - Pengolah Data dan Informasi	II/d	III/a	Reguler
3	Luciana Haloho, S.E.	Arsiparis Terampil	II/d	III/a	Reguler

3.3 PENSIUN

Sepanjang tahun 2024 tidak terdapat Pegawai yang memasuki masa pensiun di Pengadilan Negeri Sibolga

3.4 DIKLAT (SDM TEKNIS / NON TEKNIS YANG TELAH MENGIKUTI DIKLAT)

Sepanjang tahun 2024 SDM Teknis/ Non Teknis yang mengikuti diklat adalah :

No	Nama Peserta Diklat	Jabatan	Nama / Jenis Diklat	Penyelenggara diklat
1	-	-	-	-

BAB IV
PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA PRASARANA DAN
TEKNOLOGI INFORMASI

4.1. PENGELOLAAN KEUANGAN

Realisasi Anggaran Teknis (DIPA 03)

Total alokasi anggaran untuk mendukung program dan kegiatan yang bersifat teknis pada Pengadilan Negeri Sibolga adalah sebesar Rp.182.680.000,- (seratus delapan puluh dua enam delapan puluh rupiah) sesuai dengan DIPA Pengadilan Negeri Sibolga Tahun Anggaran 2024 Nomor DIPA-005.01.2.098739/2024. Jumlah tersebut di atas seluruhnya merupakan pagu anggaran untuk belanja barang.

Adapun realisasi terhadap anggaran tersebut adalah sebagai berikut:

TOTAL PAGU DIPA 03 T.A. 2024	:	Rp. 181.402.000,-
PENANGANAN PERKARA Peningkatan Manajemen Peradilan Umum		
PAGU		Rp.182.680.000,-
REALISASI		Rp. 181.402.000,-
SISA		Rp. 1.278.000,-
PERSENTASE REALISASI		99.30 %
PNBP DIPA 03		
DITERIMA		Rp.48.673.500,-
DISETORKAN		Rp.48.673.500,-
SISA		Rp.0,-
PERSENTASE REALISASI		127%

Realisasi Anggaran Non Teknis (DIPA 01)

Total alokasi anggaran untuk mendukung program dan kegiatan yang bersifat non teknis pada Pengadilan Negeri Sibolga adalah sebesar Rp.

5.556.997.000,- (lima miliar lima ratus lima puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) sesuai dengan DIPA Pengadilan Negeri Sibolga Tahun Anggaran 2024 Nomor DIPA-005.03.2.099203/2024 tanggal 24 November 2023. Jumlah tersebut di atas seluruhnya merupakan pagu anggaran untuk belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal.

Rincian realisasi anggaran tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

TOTAL PAGU DIPA 01 T.A. 2024 :	Rp. 5.556.997.000,-
BELANJA PEGAWAI	
PAGU	Rp. 4.142.151.000,-
REALISASI	Rp. 4.029.881.437,-
SISA	Rp. 112.269.527,-
PERSENTASE REALISASI	97.29%
BELANJA BARANG	
PAGU	Rp. 1.414.846.000,-
REALISASI	Rp. 1.344.691.748,-
SISA	Rp. 70.154.252,-
PERSENTASE REALISASI	95.04%
BELANJA MODAL	
PAGU	Rp. 0,-
REALISASI	Rp. 0,-
SISA	Rp. 0,-
PERSENTASE REALISASI	0 %
PNBP DIPA 01 (SEWA RUMAH DINAS/DLL)	
DITERIMA	Rp.28.946.645,-
DISETORKAN	Rp.28.946.645,-
SISA	Rp.0,-
PERSENTASE REALISASI	484%

4.2. Pengelolaan Sarana dan Prasarana

Pengelolaan sarana dan prasarana sangat diperlukan untuk menunjang kinerja dari Pengadilan Negeri Sibolga. Pengelolaan ini meliputi manajemen asset Barang

Milik Negara (BMN) dan pengadaan sarana dan prasarana yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Sibolga. Aset yang dikelola meliputi rumah dinas, kendaraan dinas, dan sarana/prasarana berupa gedung kantor maupun fasilitas perkantoran.

Rumah dinas yang kelola oleh Pengadilan Negeri Sibolga antara lain sebagai berikut :

No	Type	Alamat	Tahun Perolehan	Ket.
1	Rumah Negara Golongan I Tipe B Permanen	Jl. Zainul Arifin No.3, Simaremare, Sibolga Utara, Kota Sibolga	1977	-
2	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	Jl. Gatot Subroto, Pondok Batu, Sarudik, Tapanuli Tengah	1980	-
3	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	Jl. Gatot Subroto, Pondok Batu, Sarudik, Tapanuli Tengah	1980	-
4	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	Jl. Gatot Subroto, Pondok Batu, Sarudik, Tapanuli Tengah	1980	-
5	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	Jl. Gatot Subroto, Pondok Batu, Sarudik, Tapanuli Tengah	1980	-
6	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	Jl. Gatot Subroto, Pondok Batu, Sarudik, Tapanuli Tengah	1980	-
7	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	Jl. Gatot Subroto, Pondok Batu, Sarudik, Tapanuli Tengah	1980	-
8	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	Jl. Gatot Subroto, Pondok Batu, Sarudik, Tapanuli Tengah	1980	-
9	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	Jl. Padang Sidempuan, Sarudik, Tapanuli Tengah	1980	-

Kendaraan dinas yang dikelola Pengadilan Negeri Sibolga terdiri dari 1 (satu) unit kendaraan roda empat dan 4 (empat) unit kendaraan roda dua. Adapun rincian kendaraan dinas yang dikelola Pengadilan Negeri Sibolga adalah sebagai berikut :

RODA 4				
NO	NAMA PENGGUNA	JENIS/MERK KENDARAAN	PLAT NOMOR	KETERANGAN
1	-	Roda Empat / Toyota Kijang Innova	BB 355 M	Pengguna Temaziduhu Harefa, S.H.

RODA 2			
NO	NAMA PENGGUNA	JENIS/MERK KENDARAAN	PLAT NOMOR
1	Sepfri Junialson Sitio, S.T.	Roda Dua / Honda NF 125 TD	BB 2629 M
2	Endy Pangihutan, S.H.	Roda Dua / Honda NF 125 TD	BB 2630 N

Gedung Pengadilan Negeri Sibolga terdiri dari 2 (dua) lantai dengan luas bangunan 917 M2, dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa :

No	Sarana/Prasarana Gedung	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4
1.	Ruang Ketua	1	
2.	Ruang Wakil Ketua	1	
3.	Ruang Hakim	3	
4.	Ruang Panitera	1	
5.	Ruang Sekretaris	1	
6.	Ruang Sidang Umum	2	
7.	Ruang Sidang Anak	1	
8.	Ruang Kepaniteraan	3	
9.	Ruang Kesekretariatan	3	
10.	Ruang Kasir	1	
11.	Ruang Server	1	
12.	Ruang Tahanan Wanita	1	
13.	Ruang Tahanan Pria	1	
14.	Ruang Jaksa	1	
15.	Ruang Diversi dan Kaukus	1	
16.	Ruang Mediasi	1	
17.	Ruang Bapas dan Peksos	1	
18.	Ruang Tunggu Ramah Anak	1	
19.	Ruang Laktasi	1	
20.	Teleconference, Saksi Anak	1	
21.	Ruang Perpustakaan	1	
22.	Ruang Arsip	1	
23.	Ruang Penasihat Hukum	1	

24.	Ruang Posbakum	1
25.	Ruang Rapat dan Dokumen Kontrol	1
26.	Ruang Dharmayukti Karini	1
27.	Pos Penjagaan	2
28.	Musholla	1
29.	Ruang Tunggu Terbuka Hijau	1

PERANGKAT TI		
NO	NAMA PENGGUNA	JENIS PERANGKAT
1	Hendra Utama Sotardodo, S.H., M.H.	Laptop
2	Andreas Iriando Napitupulu, S.H., M.H.	Laptop
3	Fitrah Akbar Citrawan, S.H., M.H.	Laptop
4	Yura Pratama Yudhistira, S.H.	Laptop
5	Frans Martin Sihotang, S.H.	Laptop
6	Grace Martha Situmorang, S.H.	Laptop
7	Renaldy Sittumorang. A.md	Laptop
8	Esron Ginting, S.H.	Laptop
9	Andrian Halomoan Tumanggor, S.H.	Laptop
10	Ariefmen Kristian Lase, S.H.	PC
11	Sepfri Junialson Sitio, S.T.	Laptop
12	Dona Wahyuni	Laptop
13	Mika Surya Sitohang, A.Md.	Laptop
14	Endy Pangihutan. S.H	Laptop
15	Erwin Hamonangan	Laptop

4.3. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI

Dalam upaya meningkatkan pelayanan publik yang prima dan cepat danyang baik, PengadilanNegeri Sibolga telah berusaha mencanangkan penggunaan teknologi informasi dalam usaha untuk memenuhi tuntutan layanan masyarakat dan administrasi di pengadilan untuk birokrasi yang gesit dan profesional dalam memberikan pelayanan yang maksimal, bermartabat, transparan dan akuntabel. Hal ini sejalan dengan visi dan misi yang telah dicanangkan oleh Mahkamah Agung RI.

Pengadilan Negeri Sibolga menggunakan beberapa aplikasi administrasi Pendukung dan Perkara, Yaitu :

➤ **Implementasi e-Court Pengadilan Negeri Sibolga**

Dengan lahirnya PERMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 454) menjadi momentum bersejarah yang menandai sebuah era baru bagi peradilan Indonesia dalam pemanfaatan teknologi informasi di ranah judicial.

PERMA Nomor 3 Tahun 2018 telah mengonstruksi beberapa konsep hukum formal baru yang sebelumnya tidak diatur dalam sumber hukum acara perdata, yaitu pendaftaran perkara secara elektronik, pembayaran panjar perkara secara elektronik, pemanggilan pihak berperkara/pemberitahuan secara elektronik, domisili elektronik pihak berperkara, dan persidangan elektronik yang memungkinkan pihak berperkara menyampaikan jawaban, replik, dan duplik secara elektronik dan diikuti dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik pada tanggal 06 Agustus 2019 sebagai penyempurnaan dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik khususnya yang terkait dengan Tata Cara Persidangan secara Elektronik Dalam rangka mengemban tugas pokok ini.

Pada Tahun 2020 dalam rangka menyambut peradilan berbasis Teknologi Informasi, Mahkamah Agung telah menerapkan Aplikasi e-Court yang mencakup pelayanan berupa Pendaftaran perkara secara Online (E-filing), Pembayaran Panjar Perkara secara Online (E-payment), Pemanggilan secara Online (E-Summons), dan yang terbaru dan akan diterapkan secara menyeluruh pada tahun 2020 Persidangan secara Online (e-litigasi). untuk mendukung program dimaksud, Pengadilan Negeri Sibolga juga telah memfasilitasi sarana ecourt dalam layanan elitigasi berupa fasilitas teleconference pada salah satu ruang sidang.

Pada Tahun 2020 Mahkamah Agung RI melalui ecourt Kembali berevolusi dengan penambahan Fitur baru yaitu ecourt Upaya Hukum Banding yaitu Pengajuan Upaya Hukum Banding pada Pengadilan Tingkat Pertama melalui Aplikasi e-Court sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik.

Pengadilan Negeri Sibolga pada Tahun 2022 telah menjalankan pendaftaran perkara melalui ecourt dengan mewajibkan pendaftaran perkara secara online melalui ecourt, walaupun masih ada beberapa pengguna lainnya masih belum bisa menerapkan ataupun menggunakan layanan ecourt karena Usia Pengguna yang tidak mengenal Teknologi dan tidak mempunyai email. akan tetapi Pengadilan Negeri Sibolga terus mendorong pengguna ecourt serta membenahi kekurangan yang ada selain sarana prasarana pendukung ecourt maupun sumber daya manusianya.

berikut implementasi ecourt pada Pengadilan Negeri Sibolga Pada Tahun 2023:

Jenis Perkara	Jumlah Perkara	Keterangan
Perdata Gugatan	147 Perkara	
Perdata Gugatan Sederhana	7 Perkara	
Perdata Permohonan	273 Perkara	

➤ **Implementasi SIPP Pengadilan Negeri Sibolga**

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (Dirjan Badilum) Mahkamah Agung Republik Indonesia telah merilis Aplikasi Evaluasi Implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), yang berisi komponen-komponen untuk penentuan Skor Kinerja SIPP, yang antara lain berisi :

1. Kategori Kinerja
2. Kategori Kepatuhan
3. Kategori Kelengkapan
4. Kategori Kesesuaian

Dari Kategori Kinerja, Pengadilan Negeri Sibolga Tahun 2024 mampu mendapatkan Nilai Kinerja penyelesaian perkara diatas **88,13 % atau masuk dalam kategori BAIK.**

BAB V

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

5.1. AKREDITASI PENJAMIN MUTU

Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum membentuk Tim Akreditasi Internal dengan Surat Keputusan nomor 1639/DJU/SK/OT01.1/9/2015 untuk melakukan Penilaian dan Penjaminan Mutu pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama dalam lingkungan Peradilan Umum seluruh Indonesia sesuai standar sertifikasi ISO 9001:2008 dan diperkaya dengan penerapan *International Framework for Court Excellent*, Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PRB), Standar Pengawasan dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung, Pembangunan Zona Integritas dan Standar Penilaian yang pernah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum pada tahun 2014. Tim ini juga diharapkan dapat bekerja sebagaimana badan akreditasi lainnya dalam memberikan standar penilaian kepada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama.

Pengadilan Negeri Sibolga merupakan Pengadilan yang ikut serta dalam Daftar peserta Evaluasi Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), akan tetapi Pengadilan Negeri Sibolga belum berhasil menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan masihakan terus memperbaiki segala kekurangan.

Penjaminan mutu merupakan serangkaian proses yang saling berhubungan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan melaporkan data mengenai kinerja dan pelayanan untuk ditindaklanjuti dengan program peningkatan mutu secara berkelanjutan. Tujuan Akreditasi Penjaminan Mutu adalah untuk mewujudkan performa/kinerja peradilan Indonesia yang unggul/prima (*Indonesia Court Performance Excellent –ICPE*).

Akreditasi mendorong optimalisasi sarana, prasarana dan sistem manajemen untuk mewujudkan performa, kinerja dan pelayanan publik yang prima. Pengadilan sebagai benteng terakhir penegak hukum harus terus-menerus memperbaiki system pengadilan guna meningkatkan kepercayaan publik, salah satu wujud dari Badan peradilan yang Agung adalah Pengadilan yang berorientasi pada pelayanan publik

yang prima.

Pengadilan Negeri Sibolga sebagai salah satu Pengadilan Tingkat Pertama di lingkungan Peradilan Umum tentunya berkewajiban untuk turut menyukseskan program dari Dirjen Badan Peradilan Umum tersebut dengan menyediakan pelayanan standar peradilan yang bermutu, yaitu pelayanan yang mampu memenuhi kebutuhan dan kepuasan pengguna pengadilan. Untuk mencapai hal tersebut, maka Pengadilan Negeri Sibolga perlu memiliki sistem manajemen mutu, yaitu persyaratan standar yang digunakan untuk mengakses kemampuan dalam memenuhi kebutuhan pengguna pengadilan dengan peraturan yang sesuai.

Pengadilan Negeri Sibolga Kelas IB telah dinyatakan berhasil dalam menyediakan standar pelayanan peradilan sebagaimana yang dimaksud dalam program Akreditasi Penjaminan Mutu tersebut dengan diterimanya Sertifikat Akreditasi Badan Peradilan Umum pada tanggal 29 Nopember 2017 di Makassar dengan nilai "A" (Excellent). Setelah itu, dilakukan assesmen surveilan berkelanjutan oleh Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Tinggi Medan dan Pengadilan Negeri Sibolga berhasil mempertahankan nilai tersebut.

Prestasi tersebut tentunya merupakan awal dari sebuah usaha untuk terus memperbaiki diri dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat atau pencari keadilan yang merupakan salah satu elemen dalam standar sertifikasi penjaminan mutu. Program ini harus dikelola agar proses dan dampaknya dapat diarahkan pada hasil yang positif terutama dalam perbaikan sistem, kinerja, pelayanan publik, kerjasama dan kepemimpinan. Sinergitas internal dan eksternal harus dibangun agar perubahan dapat dirasakan manfaatnya bagi kita semua yakni mendorong terwujudnya badan peradilan yang agung.

5.2 Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Pengadilan Negeri Sibolga masih terus melakukan pembenahan terhadap pengelolaan keterbukaan informasi pengadilan dengan berpedoman pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1- 144/KMA/SK/I/2011, tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan. Kebijakan mengenai keterbukaan informasi yang dilaksanakan pada tahun 2017 tersebut meliputi: peningkatan publikasi putusan pada direktori putusan Mahkamah Agung RI <http://putusan.mahkamahagung.go.id>, peningkatan publikasi informasi perkara melalui aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), peningkatan pengelolaan Website, dan peningkatan pelayanan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Pengadilan. Bahwa Pengadilan Negeri Sibolga telah menjalankan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sejak tahun 2017. Adapun tujuan penerapan dari PTSP adalah demi memberi kemudahan bagi masyarakat pencari keadilan secara langsung, cepat.

5.3. Inovasi Pelayanan Publik

Dalam memudahkan para pencari keadilan untuk mendapatkan layanan di Pengadilan Negeri Sibolga, Pengadilan Negeri Sibolga sudah menyediakan sarana/prasarana Inovasi Pelayanan Publik.

Pengadilan Negeri Sibolga memberikan sarana berita dan layanan Pengadilan pada website dengan nama domain www.pn-sibolga.go.id, selain itu juga penampilan aplikasi SIPP secara online dengan situs sipp.pn-sibolga.go.id untuk mempermudah akses informasi pencari keadilan dan Aplikasi Sitasya (silakan tanya saya) merupakan inovasi berbasis WhatsApp (WA) Gate-Way yang menginformasikan tentang Perkara, Jadwal sidang, Info Tilang, Sisa Panjar, Putusan. Pengadilan Negeri Sibolga yang mana sangat membantu Stakeholder.

Pengadilan Negeri Sibolga juga sudah menarapkan Area Steril yang mana para pencari keadilan tidak bisa dengan bebas untuk memasuki Area Steril tersebut dikarenakan menggunakan Access Card Door, dan untuk Sarana dan Prasarana para pencari keadilan Pengadilan Negeri Sibolga sudah menyiapkan Ruang Tunggu Terbuka Dalam upaya meningkatkan pelayanan publik yang Modern, PN Sibolga telah

menerapkan atau menyediakan Sarana/Prasarana pendukung dalam penetapan e-Court berupa meja e-Court dan 1 unit PC yang sudah dirancang secara visual dan juga jaringan yang mendukung, dan dalam pelayanan pengadilan negeri sibolga juga sudah membuat SK TIM Pengelola e-Court dan operator e-Court yang dapat membantu apabila dibutuhkan bagi pengguna layanan yang tidak memahami tata cara pendaftaran perkara secara e-Court. Dengan adanya e-Court corner ini diharapkan dapat meningkatkan pelayanan lebih efisien kepada pencari keadilan khusus ber perkara secara elektronik.

5.4. INTERNAL

Pengawasan rutin / reguler secara kelembagaan adalah dilakukan oleh Mahkamah Agung RI melalui Badan Pengawas Mahkamah Agung dan juga oleh Pengadilan Tinggi Medan yang dilakukan secara rutin terhadap penyelenggaraan peradilan sesuai dengan kewenangan masing- masing, baik secara administratif maupun secara teknis peradilan, sedangkan pengawasan dalam tubuh instansi Pengadilan Negeri Sibolga itu sendiri secara langsung dilakukan Ketua Pengadilan Negeri melalui Hakim-hakim pengawas bidang yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri selaku Koordinator Pengawas.

Ketua Pengadilan Negeri Sibolga telah melakukan penunjukkan Hakim Pengawas Bidang di Pengadilan Negeri Sibolga untuk dapat membantu pimpinan Pengadilan untuk turut melakukan pengawasan sampai bagian terkecil pada masing-masing bidang kerja Pengadilan Negeri Sibolga :

1. Koordinator Pengawas / Yanti Suryani, S.H., M.H.
2. Hakim Pengawas Bidang Ortala / Andreas Napitupulu, SH., MH.
3. Hakim Pengawas Bidang Pidana / Danandoyo Darmakusuma, SH.,
4. Hakim Pengawas Bidang Perdata dan Eksekusi / Frans Martin Sihotang, SH., MH.
5. Hakim Pengawas Bidang Hukum / Yura Yudistira, S.H
6. Hakim Pengawas Bidang Umum dan Keuangan / Edwin Yonatan Sunarjo, SH.,
7. Hakim Pengawas Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan /Fitrah Akbar Citrawan, S.H.,M.H
8. Hakim Pengawas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) / Grace Martha Situmorang, SH.
9. Hakim Pengawas Posbakum / Yura Yudistira, S.H

Secara rutin hasil temuan dari Hakim Pengawas akan dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sibolga untuk dilakukan evaluasi dan menjadi bahan dalam mengambil tindakan-tindakan yang dianggap penting dan mendesak.

Selanjutnya pengawasan secara eksternal telah dilakukan secara terbuka kepada masyarakat luas. Pengadilan Negeri Sibolga telah menyediakan sarana dan prasarana kepada siapa saja untuk mengajukan laporan dan pernyataan keberatannya terhadap kinerja badan dan perorangan aparat peradilan, baik secara tertulis maupun secara elektronik. Semua laporan dan pengaduan akan mendapat porsi penanganannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses dan mekanisme pelaporan dan pengaduan telah disosialisasikan secara terbuka di papan pengumuman dan tempat publikasi lain di Pengadilan Negeri Sibolga.

5.5. EVALUASI

Evaluasi dalam laporan ini dimaksudkan sebagai tindakan yang bersifat intern terkait pembahasan hasil kinerja aparat peradilan, sedangkan tindakan evaluasi itu sendiri merupakan bagian dari tupoksi Pengadilan Negeri Sibolga yang finalisasi dari evaluasi itu sendiri nantinya akan berujung pada pimpinan Pengadilan Negeri Sibolga. Secara rutin tindakan evaluasi kinerja tersebut selanjutnya dilakukan minimal satu kali dalam satu bulan, yaitu dalam rapat Kepaniteraan, Kesekretariatan serta dalam rapat bulanan yang dihadiri oleh seluruh aparat peradilan.

BAB VI

PENUTUP

6.1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024 dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Negeri Sibolga telah melaksanakan program-program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Penetapan Kinerja Tahun 2024 Pengadilan Negeri Sibolga. Penanganan perkara berjalan dengan sangat baik dengan rasio penanganan perkara sebesar 88.13%.

Anggaran DIPA dapat direalisasikan dengan maksimal sesuai dengan program dan output yang ditetapkan. Realisasi Anggaran DIPA 01 BUA sebesar 99,30% dan DIPA 03 Ditjen Badilum sebesar 127 %. Untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) maka Aparatur Pengadilan telah diikutsertakan dalam berbagai Diklat dan sertifikasi, pelatihan, seminar dan sosialisasi yang berkaitan dengan Tupoksinya masing-masing.

Untuk memberikan pelayanan yang prima dan berkualitas maka Pengadilan Negeri Sibolga telah memiliki sarana maupun prasarana yang cukup memadai. Gedung kantor yang bersih dan nyaman serta tersedia fasilitas untuk penyandang disabilitas. Sarana ruang PTSP, ruang tunggu pengunjung yang nyaman serta berbagai aplikasi pendukung untuk memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi terkait layanan pengadilan.

6.2. REKOMENDASI

Berdasarkan hasil evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024, Pengadilan Negeri Sibolga telah memiliki kinerja yang baik dalam penanganan perkara, administrasi dan anggaran. Namun kami menyadari bahwa masih banyak perbaikan-perbaikan yang perlu dilakukan dan dibutuhkan dukungan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, antara lain:

1. Menambah Diklat sumber daya manusia terutama bidang teknologi (IT);
2. Menambah Volume Anggaran Belanja Barang Operasional.
3. Menambah Pagu Anggaran Belanja Modal dan Anggaran untuk Pembangunan Sarana Prasarana